

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



***PROFIL GENDER
TAHUN 2019***

***PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA***

DP2KBP3A

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA kepada kita semua, sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Buku “ Profil Gender Tahun 2019” . Serta Shalawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi gender di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota .

Dalam penusunan buku ini kami memperoleh dukungan / bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai Instansi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah memfasilitasi ketersediaan data dan Informasi gender sesuai Tupoksi masing-masing.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya ke depan

✍ Tanjung Pati, September 2019

Kepala DP2KBP3A
Kabupaten Lima Puluh Kota

FIDDRIA FALA, AP, M.Si
NIP.19751126 199501 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan pada era millenium, millenium development Goals (MDG'S) adalah menuju kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan. Akan tetapi masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan angka indeks pemberdayaan gender. Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin.

UU No 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) memberikan arah yang sangat kuat untuk mewujudkan bangsa indonesia yang berdaya saing salah satunya melalui pembangunan manusia indonesia yang berkualitas yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) , indek pembangunan gender (IPG) serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan angka kelahiran total (total fertility rate) sebesar 2,1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut selanjutnya mengamankan perlunya peningkatan berbagai prioritas program di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki sebagai sasaran pembangunan, namun disadari hasil pembangunan tersebut belum dapat dinikmati perempuan dan laki-laki secara adil. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambil keputusan, sehingga kebutuhan dan aspirasi perempuan belum terpenuhi oleh perencana dalam mengambil keputusan. Contohnya saja dari 35 anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota hanya 2 orang (5,7%) --

perempuan, padahal 50,3 % penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perempuan.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah dan organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang anak telah berupaya memenuhi hak-hak anak melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang dirancang bagi kepentingan anak. Dengan tersedianya data gender dan anak yang terpilah menjadi salah satu hal yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan gender dan anak. Dengan tersedianya data yang tepat dan akurat maka akan memudahkan dalam melahirkan perencanaan yang responsif gender dan anak.

Dengan disusunnya buku perspektif gender dan kesejahteraan perlindungan anak merupakan salah satu upaya untuk menyediakan informasi berkelanjutan yang dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan anak dan peran perempuan disektor Publik. Sedangkan data tentang anak

berkaitan dengan data kelembagaan yang terkait unsur-unsur pengarusutamaan hak anak, yang berfungsi secara efektif dalam pemenuhan hak anak untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan hak anak diseluruh bidang dan dilengkapi dengan anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang cacat.

1.3 Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan buku ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari dari berbagai instansi, OPD baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Instansi terkait (Polres, Kejaksaan, Pengadilan dan Kemenag) di Kabupaten Lima Puluh Kota serta dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Letak Administratif

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 002528,71” LU dan 0022’14,52” LS serta antara 100015’44,10” – 100050’47,80” BT. Luas daratan mencapai 3.354,30 Km² yang berarti 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229.,64 Km². Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu ;Kabupaten Agam , Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau.Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX sebesar 723,36 KM² dan yang terkecil adalah Kecamatan Luhak yaitu : 61,68 KM². Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter.

Disamping itu Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki 3 buah gunung berapi yang tidak aktif yang indah dan sangat potensial sebagai objek wisata yaitu Gunung Sago (2.2610 M), Gunung Bungsu (1.253 M), Gunung Sanggul (1.495 M) serta 13 buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan / Irigasi.

Jika dilihat secara administratif Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 13 Kecamatan dan 79 Nagari serta 407 jorong, dimana terjadi penambahan 3 jorong di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh dan 1 jorong di Nagari Gurun Kecamatan Harau.Dari 13 Kecamatan ini, Kecamatan Harau yang mempunyai jumlah Nagari terbanyak yaitu 11 Nagari dan 44 jorong, sedangkan yang mempunyai jumlah nagari terkecil adalah Kecamatan Gunung Omeh hanya dengan 3 Nagari dan 17 jorong, namun kalau kita lihat lebih rinci per kecamatannya dapat dilihat seperti di bawah ini :

1. Kecamatan Harau
2. Kecamatan Pangkalan Koto Baru
3. Kecamatan Kapur IX

4. Kecamatan Luhak
5. Kecamatan Lareh Sago Halaban
6. Kecamatan Situjuah Limo Nagari
7. Kecamatan Payakumbuh
8. Kecamatan Akabiluru
9. Kecamatan Mungka
10. Kecamatan Guguk
11. Kecamatan Gunuang Omeh
12. Kecamatan Bukit Barisan
13. Kecamatan Suliki

2.2 **Situasi Geografis**

Secara Geografis Jarak dari Sarilamak ke beberapa Ibu Kota Kabupaten / Kota di Sumatera Barat adalah : Bukittinggi 43 km, Padang Panjang 62 km, Padang 134 km, Batusangkar 48 km, Painan 211 km, Lubuak Sikapiang 120 km, Pariaman 120 km, Sawah lunto 147 km, Solok 116 km, Sijunjung 179 km, Padang Aro 228 km. Pulau Punjung 243 km, Simpang Ampek 242 km. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota : Koto Baru Simalanggang 16 km, Sariak Laweh 26 km, Pakan Sabtu 19 km, Situjuah Banda Dalam 20 km, Pakan Rabaa 24 km, Tanjung Pati 2 km, Dangung-dangung 24 km, Mungka 26 km, Padang Loweh 35 km, Koto tinggi 55 km, Banja Loweh 36 km, Pangkalan 44 km dan Muaro Paiti 78 km.

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 m dan 2261 m . Jarak dari Sarilamak ke beberapa Ibukota Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat adalah : Payakumbuh 10 Km, Bukittinggi 43 Km, Padang Panjang 62 km, Padang 134 Km, Batu sangkar Km, Painan 211 Km, Lubuak Sikaping 120 Km, Pariaman 120 Km, Sawahlunto 147 Km, Solok 116 Km, Sijunjung 179 Km, Padng Aro 228 Km, Pulau Punjung 243 Km, Simpang Ampek 242 Km.

Jarak dari Ibu kota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota : Koto Baru Simalanggang 16 Km, Sariak Laweh 26 Km, Pakan Sabtu 19 Km, Situjuah Banda Dalam 20 Km, Pakan Rabaa 24 Km, Tanjung Pati 2 Km, Dangung-dangung 24 Km, Mungka 26 Km, Padang Loweh 35 Km, Koto Tinggi 55 Km, Banja Loweh 36 Km, Pangkalan 44 Km, Muaro Paiti 78 Km.

BAB III

KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018 tercatat sebanyak 379.542 jiwa, dengan rincian 188.472 jiwa penduduk laki-laki dan 191.042 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 98,65 %. Rasio jenis kelamin, adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dengan rasio jenis kelamin adalah 98,65%, maka angka ini memperlihatkan bahwa pada umumnya didaerah Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Jumlah yang relatif lebih banyak ini tentunya mempunyai implikasi terhadap berbagai aspek pembangunan di kabupaten lima puluh kota, baik aspek sosial, budaya, maupun aspek politik. Dengan kata lain penduduk perempuan perlu mendapatkan perhatian terkait dengan berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik maupun perlindungan hukum, karena secara sosial budaya perempuan dihadapkan pada tuntutan sosial budaya yang berbeda dengan laki-laki.

3.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| Tabel 3.1 | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin | | | | |
| Tahun 2018 | | | | |
| No | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Rasio jenis Kelamin |
| 1 | Payakumbuh | 17,502 | 17,803 | 98,31 |
| 2 | Akabiluru | 13,571 | 13,924 | 97,46 |
| 3 | Luhak | 13,637 | 14,055 | 97,03 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------|---------|--------|
| 4 | Lareh Sago Halaban | 18,788 | 19,185 | 97,93 |
| 5 | Situjuah Limo Nagari | 10,788 | 11,263 | 95,78 |
| 6 | Harau | 25,691 | 25,541 | 100,59 |
| 7 | Guguak | 17,969 | 19,002 | 94,56 |
| 8 | Mungka | 13,472 | 13,832 | 97,40 |
| 9 | Suliki | 7,519 | 7,997 | 94,02 |
| 10 | Bukik Barisan | 11,583 | 12,011 | 96,44 |
| 11 | Gunuang Omeh | 6,788 | 6,766 | 100,33 |
| 12 | Kapur IX | 15,434 | 14,543 | 106,13 |
| 13 | Pangkalan Koto Baru | 15,730 | 15,120 | 104,03 |
| | Kabupaten | 188,472 | 191,042 | 98,65 |
| Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota | | | | |

Pada daerah-daerah tertentu juga ditemukan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Daerah tersebut adalah kecamatan Harau, Kapur IX, Pangkalan dan Gunuang Omeh. Secara ekonomi dapat dikatakan bahwa daerah-daerah dengan jumlah laki-laki lebih banyak adalah pada daerah-daerah perkebunan.

| Tabel 3.2 | | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk | | | | |
| Per Km² Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 | | | | |
| No | Kecamatan | Luas /Area (km²) | Penduduk | Kepadatan Per km² |
| 1 | Payakumbuh | 99,47 | 35.305 | 355 |
| 2 | Akabiluru | 94,26 | 27.495 | 292 |
| 3 | Luak | 61,68 | 27.692 | 449 |
| 4 | Lareh Sago Halaban | 394,85 | 37.973 | 96 |
| 5 | Situjuah Limo Nagari | 74,18 | 22.051 | 297 |
| 6 | Harau | 416.80 | 51.232 | 123 |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|------------|
| 7 | Guguak | 106,20 | 36.971 | 348 |
| 8 | Mungka | 83,76 | 27.304 | 326 |
| 9 | Suliki | 136,94 | 15.516 | 113 |
| 10 | Bukik Barisan | 294,20 | 23.594 | 80 |
| 11 | Gunuang Omeh | 156,54 | 13.554 | 87 |
| 12 | Kapur IX | 723,36 | 29.977 | 41 |
| 13 | Pangkalan Koto Baru | 712,06 | 30.850 | 43 |
| | Kabupaten | 3354.30 | 379.514 | 113 |
| Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota | | | | |

Kemudian kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018 mencapai 113 jiwa per km² dengan luas kabupaten sebesar 3.354,30 Km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Luhak dengan tingkat kepadatan sebesar 449 jiwa per km², dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kapur IX dengan tingkat kepadatan sebesar 41 jiwa per km². Jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018 tercatat sebesar 95.178. Maka rata-rata anggota rumah tangga pada tahun 2018 tercatat sebesar 4 jiwa per rumah tangga.

3.3 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.

| Tabel 3.3 | | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur | | | | |
| Tahun 2018 | | | | |
| No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | 0-4 | 19.262 | 18.375 | 37.637 |
| 2 | 5-9 | 19.455 | 18.600 | 38.055 |
| 3 | 10-14 | 17.783 | 16.563 | 34.346 |
| 4 | 15-19 | 14.740 | 13.042 | 27.782 |
| 5 | 20-24 | 11.927 | 11.537 | 23.464 |
| 6 | 25-29 | 13.344 | 13.428 | 26.772 |
| 7 | 30-34 | 14.452 | 14.375 | 28.827 |
| 8 | 35-39 | 13.551 | 13.990 | 27.541 |
| 9 | 40-44 | 12.543 | 12.378 | 24.921 |
| 10 | 45-49 | 10.980 | 11.037 | 22.017 |
| 11 | 50-54 | 9.801 | 10.956 | 20.757 |

| | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | 55-59 | 9.373 | 10.883 | 20.256 |
| 13 | 60-64 | 8.553 | 9156 | 17.709 |
| 14 | 65-69 | 6.016 | 6451 | 12.467 |
| 15 | 70-74 | 3.252 | 4324 | 7.576 |
| 16 | 75 + | 3.440 | 5947 | 9.387 |
| | Kabupaten | 188.472 | 191.042 | 379.514 |
| Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota | | | | |

Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 5 s/d 9 tahun dengan jumlah sebanyak 38.055 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 70 s/d 74 tahun yaitu sebesar 7.576 jiwa. Bila dilihat jumlah penduduk pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) ternyata jumlah penduduk perempuan relatif lebih banyak dibanding laki-laki. Bila dilihat jumlah penduduk pada usia 40-64, menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Rentang usia ini perempuan cenderung mempunyai waktu luang yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial dan politik. Karena pada usia ini perempuan tidak lagi terikat secara penuh dengan pengasuhan anak dan kegiatan domestik. Potensi ini perlu dilirik bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan diwilayah publik, khususnya pada kegiatan sosial dan politik.

Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Tenaga Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang dianggap dapat memproduksi barang dan atau jasa. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari kerja.

BAB IV PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititik beratkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi Perempuan dan Anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun. Indikator Pendidikan seperti Angka Melek Huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang dtamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah Penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya-gunakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai Kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan menghasilkan anak –anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada BAB ini. Data dan Informasi

yang disajikan diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4.1 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 4.1

Jumlah APK Murid Usia 7-12 tahun berdasarkan Kecamatan diKabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018

| No | Kecamatan | Jumlah Murid | Jumlah Penduduk 7-12 Tahun | APK |
|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | Kec. Akabiluru | 2.529 | 3.258 | 95.64 |
| 2 | Kec. Bukik Barisan | 2.229 | 1.936 | 86.86 |
| 3 | Kec. Guguak | 3.599 | 4.185 | 101.19 |
| 4 | Kec. Gunuang Omeh | 1.422 | 1,282 | 113.99 |
| 5 | Kec. Harau | 5.702 | 5.218 | 111.11 |
| 6 | Kec. Kapur IX | 2.796 | 3.464 | 97.83 |
| 7 | Kec. Lareh Sago Halaban | 3.669 | 4.015 | 113.15 |
| 8 | Kec. Luak | 2.192 | 3.024 | 84.66 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------|-------|-------|--------|
| 9 | Kec. Mungka | 2.603 | 3.094 | 107,76 |
| 10 | Kec. Pangkalan Koto Baru | 2.962 | 3.682 | 84,87 |
| 11 | Kec. Payakumbuh | 3.119 | 4,635 | 92,15 |
| 12 | Kec. Situjuah Limo Nagari | 2.029 | 2.533 | 96,88 |
| 13 | Kec. Suliki | 1.291 | 1.701 | 92,24 |

Dari tabel diatas dapat dilihat data APK untuk SD (usia 7-12 tahun) yang terendah yaitu di Kecamatan Luhak (84,66%) dan angka yang tertinggi adalah di Kecamatan Gunuang Omeh (113,99%). Namun jika dilihat dari angka keseluruhan secara Kabupaten maka APK usia 7-12 tahun berada pada angka 108,47%. Tapi pada Kecamatan dengan angka yang melebihi 100% ini menunjukkan adanya murid yang diterima di sekolah belum cukup umur atau melebihi umur seharusnya. Hal ini perlu menjadi perhatian daerah dalam membuat kebijakan dalam penerimaan murid baru ataupun dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka angka APK usia 13-15 tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

Tabel.4.2
Jumlah APK Murid Usia 13-15 tahun berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018

| No | Kecamatan | Jumlah Murid | Jumlah Penduduk 13 - 15 Tahun | APK |
|----------|-------------------------|--------------|-------------------------------|-------|
| 1 | Kec. Akabiluru | 302 | 1.506 | 36,78 |
| 2 | Kec. Bukik Barisan | 230 | 1.055 | 46,66 |
| 3 | Kec. Guguk | 874 | 1.914 | 76,84 |
| 4 | Kec. Gunuang Omeh | 310 | 681 | 72,98 |
| 5 | Kec. Harau | 1.222 | 2.573 | 76,84 |
| 6 | Kec. Kapur IX | 901 | 1.607 | 81,14 |
| 7 | Kec. Lareh Sago Halaban | 1.020 | 1.808 | 88,72 |
| 8 | Kec. Luak | 570 | 1.296 | 66,90 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------|-----|-------|-------|
| 9 | Kec. Mungka | 321 | 1.409 | 47,55 |
| 10 | Kec. Pangkalan Koto Baru | 812 | 1.758 | 70,36 |
| 11 | Kec. Payakumbuh | 952 | 1.905 | 83,62 |
| 12 | Kec. Situjuh Limo Nagari | 378 | 1,170 | 50,77 |
| 13 | Kec. Suliki | 402 | 805 | 77,64 |

Dari tabel diatas dapat dilihat data APK untuk SMP (usia 13-15 tahun) yang terendah yaitu di Kecamatan Akabiluru (36,78%) dan angka yang tertinggi adalah di Kecamatan Lareh Sago Halaban (88,72%). Namun jika dilihat dari angka keseluruhan secara Kabupaten maka APK usia 13-15 tahun berada pada angka 81,98%.

APK yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya

4.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah

kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka angka APM usia 7-12 tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

Tabel.4.3
Jumlah APM Murid usia 7-12 tahun berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018

| No | Kecamatan | Jumlah Murid 7 -12 tahun | Jumlah Penduduk 7-12 Tahun | APM |
|----|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|
| 1 | Kec. Akabiluru | 3116 | 3.258 | 77,64 |
| 2 | Kec. Bukik Barisan | 2552 | 1.936 | 86,85 |
| 3 | Kec. Guguk | 4235 | 4.185 | 85,99 |
| 4 | Kec. Gunuang Omeh | 1621 | 1,282 | 90,15 |
| 5 | Kec. Harau | 6336 | 5.218 | 91,51 |
| 6 | Kec. Kapur IX | 3389 | 3.464 | 80,71 |
| 7 | Kec. Lareh Sago Halaban | 4543 | 4.015 | 91,38 |
| 8 | Kec. Luak | 2560 | 3.024 | 72,49 |
| 9 | Kec. Mungka | 3334 | 3.094 | 84,13 |
| 10 | Kec. Pangkalan Koto Baru | 3519 | 3.682 | 80,45 |
| 11 | Kec. Payakumbuh | 3851 | 4,635 | 74,63 |
| 12 | Kec. Situjuh Limo Nagari | 2454 | 2.533 | 80,10 |
| 13 | Kec. Suliki | 1569 | 1.701 | 75,89 |

Dari tabel diatas dapat dilihat data APM untuk SD (usia 7-12 tahun) yang terendah yaitu di Kecamatan Luhak (72,49%) dan angka yang tertinggi adalah di Kecamatan Harau (91.51%). Namun jika dilihat dari angka keseluruhan secara

Kabupaten maka APM usia 7-12 tahun berada pada angka 94,87%. Artinya angka tersebut sudah lewat dari rentang angka nasional yakni 50-90%.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka angka APM Usia 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

Tabel.4.4
Jumlah APM Murid Usia 13-15 tahun berdasarkan Kecamatan diKabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018

| No | Kecamatan | Jumlah Murid 13 - 15 tahun | Jumlah Penduduk 13 - 15 Tahun | APM |
|----|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|
| 1 | Kec. Akabiluru | 554 | 1.506 | 36,79 |
| 2 | Kec. Bukik Barisan | 486 | 1.055 | 46,06 |
| 3 | Kec. Guguk | 1472 | 1.914 | 76,90 |
| 4 | Kec. Gunung Omeh | 497 | 681 | 72,98 |
| 5 | Kec. Harau | 1977 | 2.573 | 76,83 |
| 6 | Kec. Kapur IX | 1304 | 1.607 | 81,14 |
| 7 | Kec. Lareh Sago Halaban | 1604 | 1.808 | 88,71 |
| 8 | Kec. Luak | 867 | 1.296 | |
| 9 | Kec. Mungka | 670 | 1.409 | 34,69 |
| 10 | Kec. Pangkalan Koto Baru | 1237 | 1.758 | 57,09 |
| 11 | Kec. Payakumbuh | 1593 | 1.905 | 63,40 |
| 12 | Kec. Situjuh Limo Nagari | 594 | 1,170 | 41,78 |
| 13 | Kec. Suliki | 625 | 805 | 67,03 |

Dari tabel diatas dapat dilihat data APM untuk SMP (usia 13-15 tahun) yang terendah yaitu di Kecamatan Mungka (34,69%) dan angka yang tertinggi adalah di Kecamatan Lareh Sago Halaban (88,71%). Namun jika dilihat dari angka keseluruhan secara Kabupaten maka APM usia 13-15 tahun berada pada angka 63,26%. Artinya angka tersebut masih berada pada rentang angka APM SMP secara nasional yakni 50-70%.

Nilai APM akan berkisar dari 0 sampai dengan 100. Tidak mungkin ditemukan APM lebih dari 100 karena jumlah siswa (pembilang) merupakan bagian dari jumlah penduduk usia tertentu (penyebut).

Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah. Kelemahan APM adalah kemungkinan adanya kekurangan estimasi karena siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Rentang APM di Indonesia dari hasil tabulasi data Susenas 10 tahun terakhir untuk SD berkisar antara 50 sampai 95 persen, SMP antara 50 sampai 70 persen, dan SMA antara 20 sampai 50 persen.

BAB V

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

V.1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan Human Development Index (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

V.2. Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab sebab lain per 100.000,- kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain lain.

Secara nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan dari 228p per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2019 didapatkan jumlah kematian ibu tahun 2018 sebanyak 2 kasus. Kasus ini mengalami penurunan dari tahun lalu yang berjumlah 8 kasus.

Tabel V.1
Jumlah Kematian Bayi, Anak-anak dan ibu melahirkan Menurut
Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018

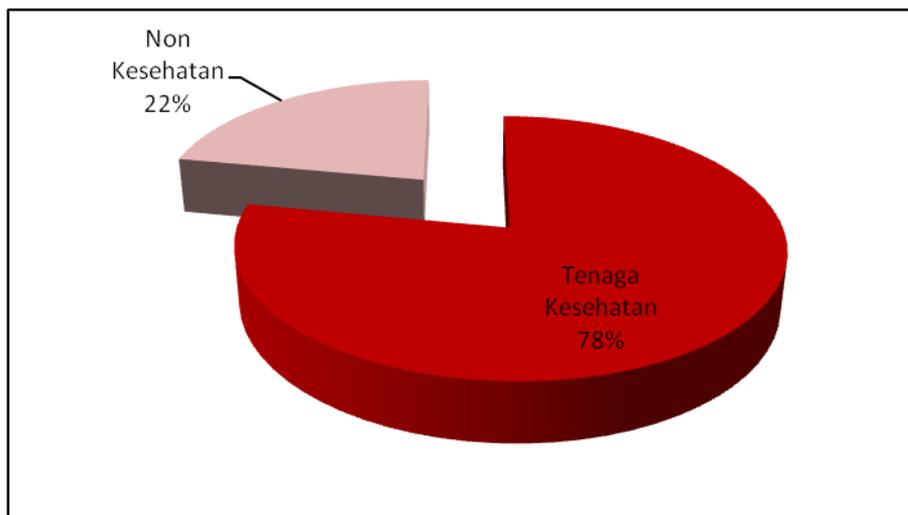
| No. | KECAMATAN | BAYI | ANAK | IBU MELAHIRKAN |
|------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1 | Payakumbuh | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Akabiluru | 10 | 2 | 0 |
| 3 | Luak | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Lareh Sago Halaban | 9 | 0 | 1 |
| 5 | Situjuah Limo Nagari | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Harau | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Guguak | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Mungka | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Suliki | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Bukik Barisan | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Gunuang Omeh | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Kapur IX | 6 | 1 | 0 |
| 13 | Pangkalan Koto Baru | 8 | 0 | 0 |
| | Kabupaten | 60 | 11 | 2 |

V.3 Cakupan Pertolongan Persalinan

Pelayanan pertolongan persalinan adalah suatu bentuk pelayanan terhadap persalinan ibu melahirkan yang dilakukan oleh penolong persalinan baik oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan atau non tenaga kesehatan seperti dukun. Persalinan yang aman memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai keterampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Pertolongan persalinan tenaga kesehatan terlatih merupakan salah satu cara efektif untuk menurunkan kematian ibu dan bayi.

Pemanfaatan pertolongan persalinan oleh tenaga profesional (bidan) di masyarakat masih belum sesuai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor ibu seperti pengetahuan, sikap terhadap pemilihan penolong persalinan, untuk memanfaatkan tenaga ahli dalam pertolongan persalinan, serta jangkauan kepelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang tidak berkualitas, dan perilaku tenaga kesehatan yang tidak ramah.

Gambar. 5.2
Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan
Oleh Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018



V.4 Penderita HIV dan AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan akibat turunnya / hilangnya daya tahan tubuhnya, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain.

Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya. Jangka waktu antara terkena infeksi dan munculnya gejala penyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 6-10 tahun. Selama kurun waktu tersebut, walaupun masih tampak sehat, baik secara sadar maupun tidak, yang bersangkutan dapat menularkan virus HIV kepada orang lain. Virus HIV ditularkan kepada orang sehat terutama melalui hubungan seksual, disamping itu juga bisa melalui darah/ produk darah (misalnya tranfusi, suntikan, tindakan medis dll) serta dari ibu yang terinfeksi kepada janin/ bayinya.

AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang sangat terbatas diketahui keberadaannya di 14 provinsi. Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 33 orang, meninggal 4 orang jadi tinggal 29 orang.

V.5 KELUARGA BERENCANA.

Jumlah akseptor KB aktif tahun 2018 adalah 41,048 (72,74%) jauh naik dibandingkan dengan tahun 2017 tercatat sebanyak 41.09 (73,4%) akseptor dengan berbagai jenis alat kontrasepsi yang digunakan seperti IUD, Pil, Kondom, Suntik, Implant dan lain sebagainya. Sementara Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan masyarakat tahun 2018 adalah dengan Suntik sebanyak 23.254 (56,65%) , kemudian Pil KB sebanyak 6.057 (14,75%).

Tabel V.3

| Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Aktif (PA) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------|---------|--------|-------|--------|----------------------|--------|--------|--------|
| menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin | | | | | | | | | | | |
| Tahun 2018 | | | | | | | | | | | |
| No | Kecamatan | Peserta KB Perempuan | | | | | | Peserta KB Laki-Laki | | | Total |
| | | MOW | IUD | Implant | Suntik | Pil | Jumlah | MOP | Kondom | Jumlah | |
| 1 | Harau | 253 | 636 | 640 | 3.319 | 905 | 5.953 | 28 | 253 | 281 | 6.515 |
| 2 | Luak | 108 | 309 | 212 | 1.810 | 408 | 2.847 | 10 | 126 | 136 | 3.119 |
| 3 | Payakumbuh | 186 | 266 | 741 | 2.022 | 586 | 3.801 | 36 | 153 | 189 | 4.179 |
| 4 | Lareh Sago Halaban | 108 | 179 | 486 | 3.015 | 521 | 4.309 | 9 | 154 | 163 | 4.635 |
| 5 | Mungka | 98 | 138 | 312 | 1.735 | 350 | 2.633 | 6 | 168 | 174 | 2.981 |
| 6 | Suliki | 117 | 195 | 129 | 638 | 206 | 1.285 | 12 | 73 | 85 | 4.436 |
| 7 | Situjuh Limo Nagari | 85 | 688 | 322 | 1.039 | 266 | 2.400 | 9 | 100 | 109 | 2.618 |
| 8 | Akabiluru | 79 | 188 | 223 | 1.577 | 298 | 2.365 | 14 | 64 | 78 | 2.521 |
| 9 | Guguak | 144 | 387 | 352 | 1.910 | 344 | 3.137 | 9 | 172 | 181 | 3.499 |
| 10 | Kapur IX | 49 | 129 | 638 | 1.553 | 1023 | 3.392 | 2 | 131 | 133 | 3.658 |
| 11 | Bukik Barisan | 70 | 119 | 189 | 1.944 | 399 | 2.721 | 0 | 132 | 132 | 2.985 |
| 12 | Gunuang Omeh | 85 | 62 | 178 | 624 | 362 | 1.311 | 0 | 46 | 46 | 1.403 |
| 13 | Pangkalan Koto Baru | 118 | 175 | 526 | 2.068 | 389 | 3.276 | 4 | 107 | 111 | 3.498 |
| | Kabupaten | 1.500 | 3471 | 4.948 | 23.254 | 6.057 | 39.430 | 139 | 1.679 | | 46.847 |
| Sumber Data : | | | | | | | | | | | |
| DP2KBP3A Kab.Lima Puluh Kota | | | | | | | | | | | |

V.6. USIA PERKAWINAN PERTAMA

Umur perkawinan pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dikhawatirkan masa subur perempuan juga semakin berkurang

BAB VI PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

Negara Republik Indonesia mengatur hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-undang Dasar 1945. Selain itu persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan ditegaskan didalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan diberi kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berperan disegala bidang pembangunan.

Representasi perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan merupakan hal penting untuk mewujudkan demokratisasi. Representasi ini akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan publik yang dihasilkan. Artinya diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan.

Jika kita lihat jumlah perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Bab III didapatkan jumlah penduduk pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) jumlah penduduk perempuan relatif lebih banyak dibanding laki-laki. Dan juga jumlah penduduk pada usia 40-64, menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Rentang usia ini perempuan cenderung mempunyai waktu luang yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial dan politik. Karena pada usia ini perempuan tidak lagi terikat secara penuh dengan pengasuhan anak dan kegiatan domestik. Potensi ini perlu dilirik bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan diwilayah publik, khususnya pada kegiatan sosial dan politik. Untuk itu Perempuan tidak hanya harus berperan di ranah domestik tetapi peranan perempuan diranah publik akan diuraikan dibawah ini.

6.1 Partisipasi Perempuan Di Bidang Legislatif

Keterwakilan perempuan secara proporsional disektor publik khususnya di lembaga legislatif diharapkan akan berpengaruh terhadap program dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga ini. Hal ini mengandung arti bahwa program atau kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan

perempuan karena kebijakan dan program tersebut dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Untuk dapat melihat bagaimana keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di kabupaten lima puluh kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VI.1
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2018

| No | Partai Politik | Laki -laki | Perempuan | Jumlah |
|----|----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | Partai Keadilan Sejahtera | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Partai Nasdem | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Partai Gerindra | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Partai PDI Perjuangan | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Partai Golongan Karya | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Partai Demokrat | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Partai Amanat Nasional | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Partai Persatuan Pembangunan | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Partai Bulan bintang | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Partai Keadilan dan Persatuan | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH TOTAL | 31 | 4 | 35 |

Sumber : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Tabel VI.2
Jumlah Persentase Perempuan di Bidang Legislatif Tahun 2018
Di Kabupaten Lima Puluh Kota

| NO | KABUPATEN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | PERSENTASE PEREMPUAN |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|
| 1 | Kab. Lima Puluh Kota | 32 | 4 | 35 | 11,4 % |
| Jlh | | 32 | 4 | 35 | 11,4 % |

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Tabel VI.b terlihat bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah sebesar 4 Orang. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, perbandingan keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2018 adalah 11,4%, jika dibandingkan dengan keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga Eksekutif. Ini menunjukkan bahwa harapan untuk mewujudkan kuota keterwakilan perempuan di legislatif masih memerlukan kerja keras dan perjuangan pada berbagai pihak.

6.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif.

Tabel VI 2.a
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

| | Unit Kerja | Jenis Kelamin | | |
|---|--------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Sekretariat Daerah | | | |

| | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|
| 1. | Bagian Tata Pemerintahan Umum | 5 | 4 | 9 |
| 2. | Bagian Hukum | 2 | 4 | 6 |
| 3. | Bagian Orgnisasi | 4 | 8 | 12 |
| 4. | Bagian Kerjasama | 3 | 3 | 6 |
| 5. | Bagian Administrasi Pembangunan | 6 | 3 | 9 |
| 6. | Bagian Perekonomian | 3 | 3 | 6 |
| 7. | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 7 | 3 | 10 |
| 8. | Bagian Umum dan Perlengkapan | 29 | 8 | 37 |
| 9. | Bagian Keuangan | 6 | 5 | 11 |
| 10. | Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan | 3 | 5 | 8 |
| 2 | BADAN | | | |
| 1. | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 19 | 17 | 36 |
| 2. | BKPSDM | 24 | 19 | 43 |
| 3. | Badan Keuangan | 41 | 30 | 71 |
| 4. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 24 | 5 | 29 |
| 5. | Badan Kesatuan Bangsa-Bangsa Politik | 12 | 14 | 26 |
| 3 | DINAS | | | |
| 1. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 131 | 110 | 241 |
| 2. | Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga | 25 | 18 | 43 |
| 3. | Dinas Kesehatan | 31 | 71 | 102 |
| 4. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 80 | 9 | 89 |
| 5. | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan | 50 | 75 | 125 |
| 6. | Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan | 41 | 30 | 71 |
| 7. | Dinas Perikanan | 9 | 17 | 26 |
| 8. | Dinas Pangan | 8 | 9 | 17 |
| 9. | Dinas Perhubungan | 39 | 4 | 43 |
| 10. | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM | 20 | 16 | 36 |

| | | | | |
|----------|--|----|-----|-----|
| 11. | Dinas Sosial | 15 | 20 | 35 |
| 12. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 10 | 22 | 32 |
| 13. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 10 | 9 | 19 |
| 14. | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman | 27 | 9 | 36 |
| 15. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari | 16 | 12 | 28 |
| 16. | Dinas Pemadam Kebakaran | 33 | 3 | 36 |
| 17. | Dinas PM & PTSP | 15 | 21 | 36 |
| 18. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 15 | 11 | 26 |
| 19. | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 18 | 12 | 30 |
| 20. | Dinas PPKBPP dan Perlindungan Anak | 10 | 21 | 31 |
| 4 | KECAMATAN | | | |
| 1. | Kantor Camat Payakumbuh | 11 | 8 | 19 |
| 2. | Kantor Camat Suliki | 6 | 10 | 16 |
| 3. | Kantor Camat Guguk | 7 | 9 | 16 |
| 4. | Kantor Camat Bukit Barisan | 11 | 2 | 13 |
| 5. | Kantor Camat Lareh Sago Halaban | 13 | 5 | 18 |
| 6. | Kantor Camat Situjuh Limo Nagari | 12 | 6 | 18 |
| 7. | Kantor Camat Akabiluru | 10 | 7 | 17 |
| 8. | Kantor Camat Gunung Omeh | 9 | 2 | 11 |
| 9. | Kantor Camat Luak | 11 | 5 | 16 |
| 10. | Kantor Camat Harau | 12 | 7 | 19 |
| 11. | Kantor Camat Mungka | 5 | 6 | 11 |
| 12. | Kantor Camat Pangkalan Koto Baru | 11 | 6 | 17 |
| 13. | Kantor Camat Kapur IX | 18 | 4 | 22 |
| 5 | Sekretariat DPRD | 23 | 6 | 29 |
| 6 | Sekretariat KPU | 5 | 3 | 8 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja | 39 | 10 | 49 |
| 8 | Inspektorat | 22 | 14 | 36 |
| 9 | RSUD Achmad Darwis | 36 | 117 | 153 |

| | | | | |
|--------------|---------------|-------|-------|-------|
| 10 | Puskesmas | 59 | 577 | 636 |
| 11 | PDAM | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Guru SD | 582 | 1951 | 2.533 |
| 13 | Jaga/TU SD | 71 | 3 | 74 |
| 14 | Guru SMP | 218 | 599 | 817 |
| 15 | Jaga / TU SMP | 31 | 49 | 80 |
| 16 | Guru TK | 0 | 146 | 146 |
| TOTAL | | 2.015 | 4.182 | 6.197 |

Sumber Data : BKPSDM Kab.Lima Puluh Kota

Dari Tabel 6.2a dapat diperoleh gambaran keterlibatan perempuan dan laki-laki pada sektor eksekutif, dimana dapat dilihat perbandingan persentase perempuan dibidang eksekutif, yaitu 4.182 ASN Perempuan (67,48%) sedangkan ASN Laki – laki berjumlah 2.015 orang (32,51%) . Tabel diatas menunjukkan keterlibatan perempuan di sektor eksekutif lebih dominan dari pada laki-laki. Peran perempuan sangat dominan dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan langsung ke sasarannya baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan program. Namun jika dilihat minimal keterlibatan perempuan pada sektor publik adalah 30% belum tercapai .

Tabel VI.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Golongan Tahun 2018

| Dinas - Instansi / Office - Institutions | | Golongan / Groups | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|----|-----|----|-------------|---|
| | | I | II | III | IV | Jml / Total | |
| 1 | Sekretariat Daerah | | | | | | |
| | 1. | Bagian Tata Pemerintahan Umum | | 2 | 6 | 1 | 9 |
| | 2. | Bagian Hukum | | | 5 | 1 | 6 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|---|---|----|----|-----|------------|
| | 3. | Bagian Orgnisasi | | 2 | 8 | 2 | 12 |
| | 4. | Bagian Kerjasama | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| | 5. | Bagian Administrasi Pembangunan | | | 8 | 1 | 9 |
| | 6. | Bagian Perekonomian | | 1 | 3 | 2 | 6 |
| | 7. | Bagian Kesejahteraan Rakyat | | 2 | 6 | 2 | 10 |
| | 8. | Bagian Umum dan Perlengkapan | 2 | 14 | 12 | 9 | 37 |
| | 9. | Bagian Keuangan | | | 10 | 1 | 11 |
| | 10. | Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan | | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 2 | BADAN | | | | | | - |
| | 1. | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | | 3 | 28 | 5 | 36 |
| | 2. | BKPSDM | | 5 | 33 | 5 | 43 |
| | 3. | Badan Keuangan | | 16 | 46 | 9 | 71 |
| | 4. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 7 | 15 | 7 | 29 |
| | 5. | Badan Kesatuan Bangsa-Bangsa Politik | | 4 | 18 | 4 | 26 |
| 3 | DINAS | | | | | | - |
| | 1. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1 | 31 | 91 | 118 | 241 |
| | 2. | Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga | | 4 | 34 | 5 | 43 |
| | 3. | Dinas Kesehatan | 1 | 13 | 77 | 11 | 102 |
| | 4. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 | 24 | 56 | 6 | 89 |
| | 5. | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan | | 23 | 85 | 17 | 125 |
| | 6. | Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan | | 14 | 46 | 11 | 71 |
| | 7. | Dinas Perikanan | | 1 | 20 | 5 | 26 |
| | 8. | Dinas Pangan | | 2 | 10 | 5 | 17 |
| | 9. | Dinas Perhubungan | 2 | 16 | 19 | 6 | 43 |

| | | | | | | |
|----------|--|---|----|----|----|----|
| 10. | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM | 1 | 2 | 21 | 12 | 36 |
| 11. | Dinas Sosial | | 7 | 18 | 10 | 35 |
| 12. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | | 3 | 23 | 6 | 32 |
| 13. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | 2 | 10 | 7 | 19 |
| 14. | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman | | 3 | 22 | 11 | 36 |
| 15. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari | | 7 | 16 | 5 | 28 |
| 16. | Dinas Pemadam Kebakaran | 2 | 12 | 17 | 5 | 36 |
| 17. | Dinas PM & PTSP | | 1 | 27 | 8 | 36 |
| 18. | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | 19 | 7 | 26 |
| 19. | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | | 3 | 18 | 9 | 30 |
| 20. | Dinas PPKBPP dan Perlindungan Anak | 1 | 3 | 22 | 5 | 31 |
| 4 | KECAMATAN | | | | | - |
| 1. | Kantor Camat Payakumbuh | | 6 | 11 | 2 | 19 |
| 2. | Kantor Camat Suliki | | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 3. | Kantor Camat Guguak | | 6 | 10 | | 16 |
| 4. | Kantor Camat Bukit Barisan | | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 5. | Kantor Camat Lareh Sago Halaban | 1 | 8 | 7 | 2 | 18 |
| 6. | Kantor Camat Situjuah Limo Nagari | | 6 | 10 | 2 | 18 |
| 7. | Kantor Camat Akabiluru | | 7 | 8 | 2 | 17 |
| 8. | Kantor Camat Gunuang Omeh | | 2 | 8 | 1 | 11 |
| 9. | Kantor Camat Luak | | 6 | 8 | 2 | 16 |
| 10. | Kantor Camat Harau | | 13 | 4 | 2 | 19 |
| 11. | Kantor Camat Mungka | | 2 | 8 | 1 | 11 |
| 12. | Kantor Camat Pangkalan Koto Baru | | 7 | 9 | 1 | 17 |
| 13. | Kantor Camat Kapur IX | | 8 | 11 | 3 | 22 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----|-----------|------------|--------------|--------------|
| 5 | Sekretariat DPRD | | 7 | 19 | 3 | 29 |
| 6 | Sekretariat KPU | | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 18 | 24 | 6 | 49 |
| 8 | Inspektorat | | 1 | 26 | 9 | 36 |
| 9 | RSUD Achmad Darwis | 2 | 32 | 113 | 6 | 153 |
| 10 | Puskesmas | 2 | 202 | 406 | 26 | 636 |
| 11 | PDAM | | | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Guru SD | | 120 | 1.205 | 1.208 | 2.533 |
| 13 | Jaga/TU SD | 12 | 60 | | 2 | 74 |
| 14 | Guru SMP | | 6 | 310 | 501 | 817 |
| 15 | Jaga / TU SMP | 2 | 26 | 50 | 2 | 80 |
| 16 | Guru TK | | 12 | 103 | 31 | 146 |
| TOTAL | | | 34 | 797 | 3.228 | 2.138 |
| | | | | | | 6.197 |

Sumber : BKPSDM Kab.Lima Puluh Kota

Data tentang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dirinci menurut jenis golongan dengan jumlah pegawai pada tahun 2018 adalah sebanyak 6.197 orang, yang terdiri dari 2.015 orang laki-laki dan 4.182 orang perempuan..Kalau dilihat menurut golongan/ruang, pegawai golongan (I) tercatat sebanyak 34 orang, golongan (II) tercatat sebanyak 797 orang, golongan (III) tercatat sebanyak 3.228 orang dan pegawai golongan (IV) tercatat sebanyak 2.138 orang.

6.3 Partisipasi perempuan di bidang yudikatif

Tabel VI.3 a
Jumlah ASN Instansi vertikal Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Golongan Tahun 2018

| No | INSTANSI | GOLONGAN | | | | JUMLAH |
|----|-----------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | Kementerian Agama | 3 | 71 | 270 | 66 | 410 |
| 2 | Kantor Pertanahan | 0 | 4 | 19 | 2 | 25 |
| 3 | Pengadilan Negeri | 0 | 4 | 20 | 2 | 26 |
| 4 | Kejaksaan Negeri | 0 | 4 | 34 | 1 | 39 |
| 5 | Badan Pusat Statistik | 0 | 4 | 16 | 2 | 22 |
| 6 | Pengadilan Agama | 0 | 2 | 17 | 2 | 21 |
| | JUMLAH | 3 | 89 | 376 | 75 | 543 |

Sumber Data : BPS Kab.LPK

Tabel 3b
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal
di Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

| No | Unit Kerja | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|-------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Kementerian Agama | 141 | 269 | 410 |
| 2 | Kantor Pertanahan | 12 | 13 | 25 |

| | | | | |
|----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 3 | Pengadilan Negeri | 15 | 11 | 26 |
| 4 | Kejaksaan Negeri | 23 | 16 | 39 |
| 5 | Badan Pusat Statistik | 15 | 7 | 22 |
| 6 | Pengadilan Agama | 6 | 15 | 21 |
| | TOTAL | 212 | 331 | 543 |

Sumber Data : BPS Kab.LPK

Dari Tabel 6.3b dapat diperoleh gambaran keterlibatan perempuan dan laki-laki pada sektor eksekutif Instansi Vertikal di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 berjumlah 543 orang, dimana dapat dilihat perbandingan antara ASN Perempuan 331 orang (60,96%) sedangkan ASN Laki-laki berjumlah 212 orang (39,04%)

Disini dapat kita lihat bahwa peran perempuan masih mendominasi pada sektor Eksekutif Instansi Vertikal di banding laki-laki .

6.4 Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berspektif perempuan, dimana anggotanya didominasi oleh kaum ibu. Merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari kmitmn yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut . apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan BKOW terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal.

**Tabel VI 4
Organisasi Perempuan Menurut Jenis Organisasi
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018**

| No | NAMA ORGANISASI PEREMPUAN |
|----|---|
| 1 | Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lima Puluh Kota (GOW) |
| 2 | Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 3 | Dharma Yuktikarini Cabang Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 4 | Adhiyaksa Dharma Karini Daerah Payakumbuh |
| 5 | Dharma Wanita Persatuan Unit Kantor Kementerian Agama |
| 6 | DWP Unit Kesehatan |
| 7 | DWP Politani |
| 8 | DWP Unit Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 9 | DWP Unit Dinas Pendidikan |
| 10 | Ikatan Bidan Indonesia (IBI) |
| 11 | Bundo Kanduang (BK) Luak Limo Puluah |
| 12 | Persit Bataliyon |
| 13 | Persit Kodim |
| 14 | Persit Denzipur |
| 15 | Bhayangkari Cabang 50 Kota |
| 16 | Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) |
| 17 | Aisyah |
| 18 | Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah (Perwati) |
| 19 | Ikatan Guru TK Indonesia |

| | |
|----|--|
| 20 | Ikatan Ahli Boga Indonesia (Ika Boga) |
| 21 | Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP) Cabang Lima Puluh Kota |
| 22 | Wanita Islam (WI) Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 23 | Pimpinan Wilayah Nasyiatul Asyiah |
| 24 | Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) |
| 25 | Ikatan Guru Bustanul Adfal (IGABA) |
| 26 | Puti Bonsu |
| 27 | Ikatan Dokter Indonesia |
| 28 | Komisi Lanjut Usia |
| 29 | Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) |
| 30 | Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 31 | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) |
| 32 | Forum Kabupaten Sehat |
| 33 | Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 34 | Muslimat NU |
| 35 | Persaudaraan Muslima (SALIMAH) |
| 36 | Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) |
| 37 | Badan Kontak Majelis Ta;lim (BKMT) |
| 38 | Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) |
| 39 | Persatuan Analis Gizi (Persagi) |
| 40 | Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) |

Sumber Data : DP2KBP3A Kab.LPK

BAB VII

EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN

Sejalan dengan perkembangan perekonomian negara-neagara di dunia, berbagai penelitian tentang permasalahan yang dihadapi negara berkembang telah dilakukan termasuk diantaranya oleh Todaro (1987) dan Nafziger (1990). Penelitian itu mengungkapkan bahwa permasalahan utama d negara berkembang adalah adanya ketidakmerataan pendapatan dan pengangguran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oelh pengurangan pengangguran, karena hal ini sangat tergantung pada bagaimana memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena secara teori pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen, dapat menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 500 ribu pekerja.

Sebagaimana yang dialami banyak negara berkembang, indonesia juga memiliki masalah dilematis dalam hal ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi selaras dengan penciptaan lapangan pekerjaan belum bisa memenuhi kesetaraan pekerja laki-laki dan perempuan. Dari sisi penduduk yang bekerja, lapangan pekerjaan dan sektor pekerjaan secara umum mencerminkan ketimpangan gender.

Menurut SDG's bahwa untuk mengukur kesetaraan di bidang tenaga kerja antara lain dapat diukur dari tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, persentase upah perempuan disektor non pertanian dan perbedaan upah anantara tenga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.

Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan, karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan. Indikator ini juga memungkinkan diketahuinya permasalahan yang akan muncul apabila ketenagakerjaan bermasalah. Misalnya banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap dapat menimbulkan pengangguran yang pada gilirannya akan berdampak baik secara ekonomi maupun sosial. Dibandingkan dengan laki-laki perempuan relatif sulit untuk

mendapatkan pekerjaan yang bernilai ekonomis baik. Oleh karena itu kebanyakan perempuan bekerja disektor informal.

Jika kita lihat Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2017 tercatat sebanyak 376.072 jiwa, dengan rincian 186.821 jiwa penduduk laki-laki dan 189.251 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 98,72 persen.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari kerja. Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Tenaga Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang dianggap dapat memproduksi barang dan atau jasa.

Pada tahun 2018 jumlah Angkatan kerja tercatat sebesar 196.760 jiwa dengan rincian 191.453 jiwa bekerja dan sebesar 5.307 jiwa pengangguran terbuka. Sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2018 sebesar 73.300 jiwa dengan rincian sebanyak 21.144 jiwa sedang bersekolah, 37.262 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya sebanyak 14.893 jiwa termasuk ke dalam kelompok lainnya.

7.1 Penduduk dengan Kegiatan Utama

Tabel VII.1

| Banyaknya Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota 2018 | | | | |
|---|---|----------------|---------------|----------------|
| NO | Status Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| I | Angkatan Kerja Economically active | 110.606 | 86.154 | 196.760 |
| | a. Bekerja | 107.791 | 83.662 | 191.453 |
| | b. Pengangguran | 2.815 | 2.492 | 5.307 |
| II | Bukan Angkatan Kerja | 21.662 | 51.638 | 73.300 |
| | a. Sekolah/Attending School | 9.925 | 11.219 | 21.144 |
| | b. Mengurus RT/House Keeping | 2.541 | 34.721 | 37.262 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------|-------|--------|
| | c. Lainnya/others | 9.196 | 5.698 | 14.894 |
| | | | | |

Sumber Data : BPS Kab.LPK

Data tabel VII.1 menunjukkan bahwa perempuan yang berkerja lebih sedikit dari pada laki-laki, padahal dikabupaten lima puluh kota jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun kalau dilihat di bukan angkatan kerja perempuan dengan kegiatan mengurus rumah tangga jumlahnya lebih besar dibanding laki-laki yaitu 34.721. kegiatan ini pada umumnya merupakan tanggung jawab perempuan. Dengan bekerja mengurus rumah tangga, maka perempuan dikelompokkan sebagai bukan angkatan kerja. Artinya tidak diperhitungkan sebagai tenaga kerja yang perlu dicarikan solusinya, sebagaimana angkatan kerja.

7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tabel VII.2

| Angkatan Kerja dan tingkat partisipasi (TPAK) Menurut JenisKelamin Tahun 2018 | | | | |
|--|---|----------------|---------------|----------------|
| NO | Status Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| I | Angkatan Kerja Economically active | 110.606 | 86.154 | 196.760 |
| | c. Bekerja | 107.791 | 83.662 | 191.453 |
| | d. Pengangguran | 2.815 | 2.492 | 5.307 |
| | Jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk /percentage Economically Active to total Pop | 58,69 | 45,10 | 51,85 |
| | Tingkat Partisipasi angkatan kerja/Participation of economically active | 83,62 | 62,52 | 72,86 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka/Open Unemployment Rate | 2,55 | 2,89 | 2,60 |

Meskipun dari tahun ketahun partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat, tetapi perbedaannya sangat nyata apabila dibandingkan dengan partisipasi angkatan laki-laki Berdasarkan data sakernas 2008 TPAK perempuan sebesar 51,25 persen dan laki-laki 83,58 persen. Jika kita lihat di Kabupaten Lima Puluh Kota dari data pada tabel 7.2 dapat diketahui kondisinya hampir sama yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan yaitu 83,62 laki-laki dan 62,52 perempuan. Artinya jumlah pengangguran perempuan seharusnya jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

Lebih jauh kondisi ini dapat dilihat dari data dibawah ini, yang memaparkan jumlah penduduk usia kerja berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Sebagaimana diketahui jumlah penduduk perempuan di kabupaten lima puluh kota lebih banyak dibanding laki-laki, artinya jumlah penduduk usia kerja perempuan juga lebih banyak dibanding laki-laki. Namun dari data dibawah ini dapat dilihat bahwa hampir disetiap kelompok umur jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi, bahkan kelompok diatas 60 tahun jumlah penduduk perempuan juga lebih besar.

Dengan demikian apabila realitas tersebut tidak mendapatkan penanganan yang baik, maka secara ekonomi kehidupan perempuan akan semakin lebih banyak tergantung pada laki-laki. Hal ini juga terkait dengan perubahan sistem sosial masyarakat minangkabau yang tidak lagi menopang perempuan secara ekonomi.

7.3 Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kelamin

Tabel 7.3
Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2018

| No | Kelompok umur (tahun) | Jumlah penduduk | | |
|----|-----------------------|-----------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Total |
| 1 | 15-24 | 12.118 | 7.084 | 19.202 |
| 2 | 25-29 | 12.981 | 9.359 | 22.340 |
| 3 | 30-34 | 13.150 | 10.060 | 23.210 |
| 4 | 35-44 | 25.581 | 20.415 | 45.996 |

| | | | | |
|---------------|-------|---------|--------|---------|
| 5 | 45-54 | 20.261 | 17.837 | 38.098 |
| 6 | 55-59 | 8.549 | 7.239 | 15.788 |
| 14 | 60+ | 15.151 | 11.668 | 26.819 |
| Jumlah | 2018 | 107.791 | 83.662 | 191.453 |

Sumber Data : BPS Kab.LPK

7.4 Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin

Bila dilihat dari status pekerjaan utama, data dari tabel 7.4 menggambarkan kalau perempuan lebih banyak bekerja di pada sektor pertanian (83.315 orang) dan pertambangan / penggalian, listrik, gas, dan air, bangunan, angkutan dll (23.650 orang) . Meskipun demikian ada cukup banyak perempuan bekerja di industri (16.457 orang). Masih banyak perempuan belum mendapatkan pekerjaan utama yang lebih menguntungkan baik secara ekonomi maupun secara sosial.

Tabel VII.4

| Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenisnya | | | | |
|--|---|------------------|------------------|----------------|
| NO | Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Total |
| 1 | Pertanian, Kehutanan,Perikanan dll | 50.541 | 34.074 | 84.615 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian, listrik,gas dan air, bangunan angkutan dll | 21.033 | 1.304 | 22.337 |
| 3 | Industri/ Manufacture | 11.544 | 16.655 | 28.199 |
| 4 | Perdagangan, Rumah makan,hotel, restourant dll | 17.705 | 17.552 | 35.257 |
| 5 | Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan | 6.968 | 14.007 | 21.045 |
| Total | | 107.791 | 83.662 | 191.453 |

Sumber Data : BPS Kab.LPK

BAB VIII HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

8.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan azas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDEW). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena Konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri

**TABEL VIII.1
 TAMBAHAN NARAPIDANA PADA RUTAN SULIKI MENURUT
 JENIS KELAMIN DAN KEJAHATAN / PELANGGARAN
 TAHUN 2018**

| No | Kejahatan / Pelanggaran | Jenis Kelamin | | |
|----|-------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Pencurian | 4 | - | 4 |
| 2 | Penculikan | - | - | - |
| 3 | Penganiayaan | 1 | - | 1 |
| 4 | Perjudian | 1 | - | 1 |
| 5 | Terhadap Ketertiban | - | - | - |
| 6 | Lain-lain | 35 | - | 30 |
| | JUMLAH | 41 | - | 41 |

Sumber Data : BPS Kab.LPK

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 41 kasus kejahatan di Rutan Suliki pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Laki-laki . Jika dibandingkan dengan Tahun 2017 kasus kejahatan di Rutan Suliki Menurun . Pada Tahun 2017 Kasus kejahatan sebanyak 46 Kasus.

8.2 Penduduk Lanjut Usia

Lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia

dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia . Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa

**TABEL VIII.2
JUMLAH LANSIA DI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA YANG POTENSIAL DAN TIDAK POTENSIAL
TAHUN 2018**

| No | Kabupaten | Jumlah |
|----|----------------------------------|--------------------|
| | Kabupaten Lima Puluh Kota | 6.976 orang |
| | | |

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.LPK

8.3 Penyandang Cacat

Penyandang cacat menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik/ mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layak. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan Masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat

**TABEL VIII.3
JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS MENURUT KELOMPOK
UMUR DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2018**

| No | Kelompok Umur | Penduduk Penyandang Cacat | | |
|----|---------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | Laki - laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | 15 - 19 | 101 | 107 | 208 |
| 2 | 20 - 24 | 107 | 70 | 177 |
| 3 | 25 - 29 | 81 | 72 | 153 |
| 4 | 30 - 34 | 80 | 77 | 157 |
| 5 | 35 - 39 | 108 | 105 | 208 |
| 6 | 40 - 44 | 121 | 103 | 224 |
| 7 | 45 - 49 | 87 | 70 | 157 |
| 8 | 50 - 54 | 77 | 81 | 158 |
| 9 | 55 - 59 | 88 | 88 | 176 |
| 10 | 60 - 64 | 100 | 89 | 189 |
| 11 | 65 + | 120 | 151 | 271 |
| | JUMLAH | 1.870 | 1.813 | 2.878 |

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.LPK

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 sebanyak 2.878 orang, artinya penyandang cacat dari tahun ketahun semakin meningkat, hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah agar tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka.

8.4 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi akar dari masalah lainnya termasuk masalah perempuan rawan sosial ekonomi. Dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 bahwa perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria dari perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa dengan usia 18-59 tahun yang belum menikah, sudah menikah, atau pernah menikah yang kurang / tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi pencari nafkah utama . Kurangnya penghasilan perempuan rawan sosial ekonomi sehingga kurang dapat bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan rawan bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan sosial ekonomi berpenghasilan rendah atau tidak sama sekali

**TABEL VIII.4
JUMLAH PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI MENURUT KECAMATAN
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018**

| No | Kecamatan | Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi |
|----|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | Guguak | 59 orang |
| 2 | Harau | 34 orang |
| 3 | Payakumbuh | 51 orang |
| 4 | Bukik Barisan | 45 orang |
| 5 | Suliki | 45 orang |
| 6 | Pangkalan Koto Baru | 0 |
| 7 | Gunuang Omeh | 0 |
| 8 | Luak | 43 orang |
| 9 | Situjuh Limo Nagari | 0 |
| 10 | Mungka | 0 |
| 11 | Akabiluru | 17 orang |
| 12 | Lareh Sago Halaban | 40 orang |
| 13 | Kapur IX | 46 orang |
| | JUMLAH | 380 orang |

Dari tabel diatas terlihat bahwa Perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 sejumlah 380 orang yang terbanyak adalah Kecamatan Guguk berjumlah 59 orang dan yang paling rendah adalah Kecamatan Akabiluru sejumlah 17 orang.

8.5 Perempuan Kepala Rumah Tangga

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah rumah tangga sering di campur adukkan dengan keluarga. Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi sedangkan keluarga lebih mengacu kepada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan lain sebagainya. Definisi Rumah Tangga adalah seseorang atau kelompok orang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu.

Biasanya di dalam suatu rumah tangga ditunjuk seseorang yang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah seseorang / penduduk berumur 10 tahun ke atas dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari pada rumah tangga tersebut atau orang yang dituakan / dianggap / ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Pada umumnya yang menjadi kepala rumah tangga adalah laki-laki, namun demikian bukan berarti perempuan tidak ada yang menjadi kepala rumah tangga.

Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih mengakar kuat pada sebagian besar masyarakat. Data susenas Maret 2016 pada tabel VIII.5 menunjukkan bahwa yang menjadi kepala rumah tangga sebagian besar adalah laki-laki (83,26%), terutama pada rumah tangga yang anggotanya masih lengkap sehingga perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga lebih berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangga.

**TABEL VIII.5
PERSENTASE KEPALA RUMAH TANGGA MENURUT KECAMATAN
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017**

| No | KECAMATAN | JUMLAH RUMAH TANGGA | | | KETERANGAN |
|----|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------|
| | | Usia dibawah 45 th | Usia 45-59 th | Usia 60 th keatas | |
| 1 | Harau | 133 | 259 | 608 | |
| 2 | Situjuh | 52 | 133 | 259 | |
| 3 | Akabiluru | 71 | 123 | 249 | |
| 4 | Mungka | 17 | 50 | 72 | |
| 5 | Payakumbuh | 135 | 182 | 437 | |
| 6 | Lareh Sago Halaban | 111 | 183 | 656 | |
| 7 | Bukik Barisan | 52 | 157 | 470 | |
| 8 | Suliki | 22 | 57 | 92 | |
| 9 | Guguak | 76 | 64 | 107 | |
| 10 | Gunuang Omeh | | | | |
| 11 | Luak | 10 | 16 | 11 | |
| 12 | Pangkalan | | | | |
| 13 | Kapur IX | | | | |
| | JUMLAH | 679 | 1.224 | 2.961 | |

**BAB IX
PENUTUP****9.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan profil Gender Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Proyeksi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk Perempuan lebih banyak di bandingkan laki-laki, yaitu 191.042 (50,33%) perempuan sedangkan laki-laki 188.472 (49,67%)
2. Daerah atau Kecamatan yang lebih banyak penduduk laki-laki dibanding perempuan adalah Kecamatan Harau, Pangkalan , Gunung Omeh
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 13-15 tahun berada pada angka 81,98 %
4. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten usia 7-12 tahun berada pada angka 94,87 %.
5. Jumlah kematian ibu tahun 2018 sebanyak 2 kasus. Kasus ini mengalami penurunan dari tahun lalu yang berjumlah 8 kasus
6. Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 33 orang, meninggal 4 orang jadi tinggal 29 orang.
7. Jumlah akseptor KB aktif tahun 2018 adalah 41.048 (72,74%) jauh naik dibandingkan dengan tahun 2017 tercatat sebanyak 41,09 (73,4%) akseptor dengan berbagai jenis alat kontrasepsi yang digunakan seperti IUD, Pil, Kondom, Suntik, Implant dan lain sebagainya
8. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah sebesar 4 Orang.
9. Keterlibatan perempuan dan laki-laki pada sektor eksekutif, dimana dapat dilihat perbandingan persentase perempuan dibidang eksekutif, yaitu 4.182 ASN Perempuan (67,48%) sedangkan ASN Laki – laki berjumlah 2.015 orang (32,51%)
10. Terdapat 41 kasus kejahatan di Rutan Suliki pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Laki-laki
11. Jumlah Lansia di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 6.976 orang

12. Angka penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 sebanyak 2.878 orang .Penyandang disabilitas laki-laki sebanyak 1.870 orang dan disabilitas perempuan sebanyak 1.813 orang
13. Perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 sejumlah 380 orang yang terbanyak adalah Kecamatan Guguk sebanyak 59 orang dan yang paling rendah adalah Kecamatan Akabiluru sebanyak 17 orang.

9.2 SARAN

1. Para pengambil kebijakan di Kabupaten Lima Puluh Kota di harapkan untuk mempertimbangkan isu gender dalam menyusun perencanaan pembangunan di segala bidang
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan kebijakan peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan untuk terus melaksanakan program dan kegiatan peningkatan peran serta perempuan di sektor publik khususnya dalam bidang politik dan organisasi kemasyarakatan
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan untuk meningkatkan frekwensi upaya promosi kesehatan serta meningkatkan kualitas upaya kuratif dan rehabilitatif kesehatan sehingga derajat kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih optimal